JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

Analisis Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Nurul Dalimunte[1)], Saima Rambe[2)], Ratna Sari Dewi[3)]

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Medan, Indonesia

nuruldalimunthe@gmail.com[1)]
rambesaima@gmail.com[2)]
ratnaharahap46@gmail.com[3)]

Abstrak

Transformasi digital pada pemerintahan desa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi kebijakan desa digital diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian menggunakan pedoman PRISMA 2020 dengan menelaah artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dan diperoleh dari basis data nasional maupun internasional. Sebanyak 35 artikel yang memenuhi kriteria inklusi setelah melalui proses identifikasi, penyaringan, penghapusan duplikasi, penilaian kelayakan (*eligibility*), dan seleksi akhir dianalisis menggunakan sintesis tematik**.** Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi desa digital berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi, transparansi informasi, aksesibilitas layanan, responsivitas aparatur, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kompetensi aparatur desa, dukungan kebijakan, kepemimpinan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, keterbatasan anggaran, dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini memberikan sintesis literatur mengenai implementasi kebijakan desa digital serta merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital.

Kata kunci: Desa Digital; Kebijakan Publik; Pelayanan Publik; *Systematic Literature Review*; Transformasi Digital

Abstract

*Digital transformation in village governance has become one of the key strategies for improving the quality of public services through more effective, transparent, and accountable governance. The implementation of the Digital Village policy is expected to expand community access to information technology-based public services while strengthening village governance. This study aims to analyze the implementation of the Digital Village policy in improving public services using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The study adopted the PRISMA 2020 guidelines by reviewing scientific articles published between 2021 and 2026, retrieved from national and international scholarly databases. A total of 35 articles that met the inclusion criteria, following the processes of identification, screening, duplicate removal, eligibility assessment, and final selection, were analyzed using thematic synthesis**.** The findings indicate that the implementation of the Digital Village policy contributes to improving administrative efficiency, information transparency, service accessibility, the*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

responsiveness of village officials, and community participation in public service delivery. The success of policy implementation is influenced by several key factors, including digital infrastructure readiness, the competencies of village officials, government policy support, leadership, and stakeholder collaboration. However, inadequate digital infrastructure, limited digital literacy, budget constraints, and insufficient human resource capacity remain significant challenges to sustainable implementation. This study provides a comprehensive synthesis of the existing literature on Digital Village policy implementation and recommends strengthening the capacity of village officials, expanding digital infrastructure, and improving community digital literacy to optimize digital public service delivery.

***Key words**: Digital Transformation; Digital Village; Policy Implementation; Public Services; Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital saat ini, penelitian mengenai *digital village*, *digital government*, dan inovasi pelayanan publik mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai penelitian melaporkan bahwa implementasi desa digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi (Criado *et al.,* 2021; Matheus *et al.,* 2021; Dewi *et al.,* 2022). Namun, sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut belum berlangsung secara merata. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur desa, literasi digital masyarakat yang masih rendah, serta lemahnya dukungan kebijakan dan koordinasi antarlembaga menyebabkan implementasi desa digital belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah (Kassen, 2022; Das, 2024). Perbedaan temuan (*contradictory findings*) tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan desa digital sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, kesiapan sumber daya, dan karakteristik masing-masing wilayah.

Selain adanya perbedaan hasil penelitian, kajian terdahulu juga masih didominasi oleh pendekatan studi kasus pada desa atau daerah tertentu sehingga menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual dan sulit digeneralisasi. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan di satu lokasi, tanpa mengintegrasikan berbagai bukti empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola implementasi, faktor-faktor penentu keberhasilan, maupun tantangan yang dihadapi dalam penerapan desa digital. Terdapat kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) dan kesenjangan empiris (*empirical gap*) terkait belum tersedianya sintesis literatur yang secara sistematis memetakan bentuk implementasi desa digital, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi, serta merumuskan implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian terkini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini mensintesis temuan dari 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2021–2026 sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik. Hasil sintesis diharapkan tidak hanya memperkuat pengembangan teori mengenai implementasi kebijakan dan *digital governance*, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

recommendations) bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian (*Research Questions/RQ*), yaitu:

1. RQ1: Bagaimana peta atau tipologi bentuk implementasi kebijakan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik berdasarkan hasil penelitian periode 2021–2026?
2. RQ2: Faktor-faktor pendorong dan penghambat apa saja yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik?

Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan sintesis ilmiah mengenai perkembangan implementasi kebijakan desa digital, mengidentifikasi pola-pola temuan yang konsisten maupun yang bertolak belakang, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital di tingkat pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* **(**SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah mengenai implementasi kebijakan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, objektif, dan dapat direplikasi dibandingkan dengan kajian pustaka naratif. Seluruh tahapan penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 yang dikembangkan oleh Page *et al., (2021), meliputi tahap identification, screening, eligibility, dan included.*

Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilaksanakan pada bulan Juli 2026 melalui delapan basis data ilmiah, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Emerald Insight, Wiley Online Library, Google Scholar, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Penggunaan beberapa basis data bertujuan memperoleh cakupan literatur yang lebih komprehensif serta meminimalkan kemungkinan terlewatnya artikel yang relevan.

Strategi pencarian dikembangkan menggunakan kombinasi kata kunci berdasarkan fokus penelitian dan dihubungkan dengan operator Boolean **(**AND dan OR). Contoh sintaks pencarian pada basis data Scopus adalah sebagai berikut:

> (("Digital Village" OR "Smart Village" OR "Village Digitalization") AND ("Public Service" OR "Public Service Innovation" OR "E-Government") AND ("Policy Implementation" OR "Digital Government" OR "Digital Governance")) AND PUBYEAR > 2020

Pada basis data Google Scholar dan Garuda digunakan sintaks pencarian yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform menggunakan kombinasi kata kunci yang setara.

Tabel 1. Strategi Penelusuran Literatur

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

Basis Data	Search String
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("Digital Village" OR "Smart Village" OR "Village Digitalization") AND ("Public Service" OR "Public Service Innovation" OR "E-Government") AND ("Policy Implementation" OR "Digital Government" OR "Digital Governance")) AND PUBYEAR > 2020
ScienceDirect	("Digital Village" OR "Smart Village") AND ("Public Service") AND ("Policy Implementation")
SpringerLink	("Digital Village" OR "Smart Village") AND "Public Service"
Taylor & Francis Online	("Digital Village") AND ("Policy Implementation")
Emerald Insight	("Digital Governance") AND ("Public Service")
Wiley Online Library	("Smart Village") AND ("Digital Government")
Google Scholar	"Digital Village" AND "Public Service" AND "Policy Implementation"
Garuda	Desa Digital AND Pelayanan Publik AND Implementasi Kebijakan

Seluruh artikel hasil pencarian diekspor ke dalam perangkat lunak manajemen referensi untuk mengidentifikasi dan menghapus artikel yang terduplikasi sebelum dilakukan proses penyaringan.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Seleksi artikel dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelum proses penelusuran.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun publikasi	2021–2026	Sebelum 2021
Jenis dokumen	Artikel jurnal ilmiah peer-reviewed	Prosiding, buku, tesis, disertasi, laporan penelitian
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain bahasa Indonesia dan Inggris
Topik	Desa Digital, Smart Village, Digital Government, Pelayanan Publik	Tidak berkaitan dengan fokus penelitian
Akses dokumen	Full-text tersedia	Full-text tidak tersedia
Kualitas metodologi	Memenuhi Quality Assessment	Tidak memenuhi standar kualitas

Penilaian Kualitas Artikel (*Quality Assessment*)

Untuk menjamin kualitas sintesis, seluruh artikel yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dievaluasi menggunakan *Quality Assessment Checklist* yang diadaptasi dari Kitchenham (2007) dan Page et al. (2021). Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama, yaitu: (1) relevansi topik penelitian, (2) kejelasan tujuan penelitian, (3) ketepatan metode

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

penelitian, (4) validitas hasil penelitian, dan (5) kontribusi terhadap implementasi kebijakan desa digital.

Tabel 3. Quality Assessment Checklist

No	Kriteria Penilaian	Skor 0	Skor 1	Skor 2
1	Relevansi topik	Tidak relevan	Cukup relevan	Sangat relevan
2	Kejelasan tujuan	Tidak jelas	Cukup jelas	Sangat jelas
3	Ketepatan metode	Tidak sesuai	Sebagian sesuai	Sangat sesuai
4	Validitas hasil	Lemah	Cukup	Sangat baik
5	Kontribusi penelitian	Rendah	Sedang	Tinggi

Setiap indikator diberi skor **0–2**, dengan ketentuan 0 = tidak memenuhi kriteria, 1 = memenuhi sebagian kriteria, dan 2 = memenuhi seluruh kriteria. Skor maksimum adalah 10. Artikel dengan skor 8–10 dikategorikan berkualitas tinggi dan diikutsertakan dalam sintesis, sedangkan artikel yang memperoleh skor di bawah 8 dieliminasi.

Proses Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA 2020

Proses seleksi literatur mengikuti pedoman PRISMA 2020. Tahap identification menghasilkan 685 artikel yang diperoleh dari delapan basis data, terdiri atas Scopus (95), ScienceDirect (132), SpringerLink (87), Taylor & Francis Online (64), Emerald Insight (58), Wiley Online Library (41), Google Scholar (168), dan Garuda (40). Setelah dilakukan penghapusan 95 artikel duplikat, diperoleh 590 artikel yang memasuki tahap screening berdasarkan judul dan abstrak.

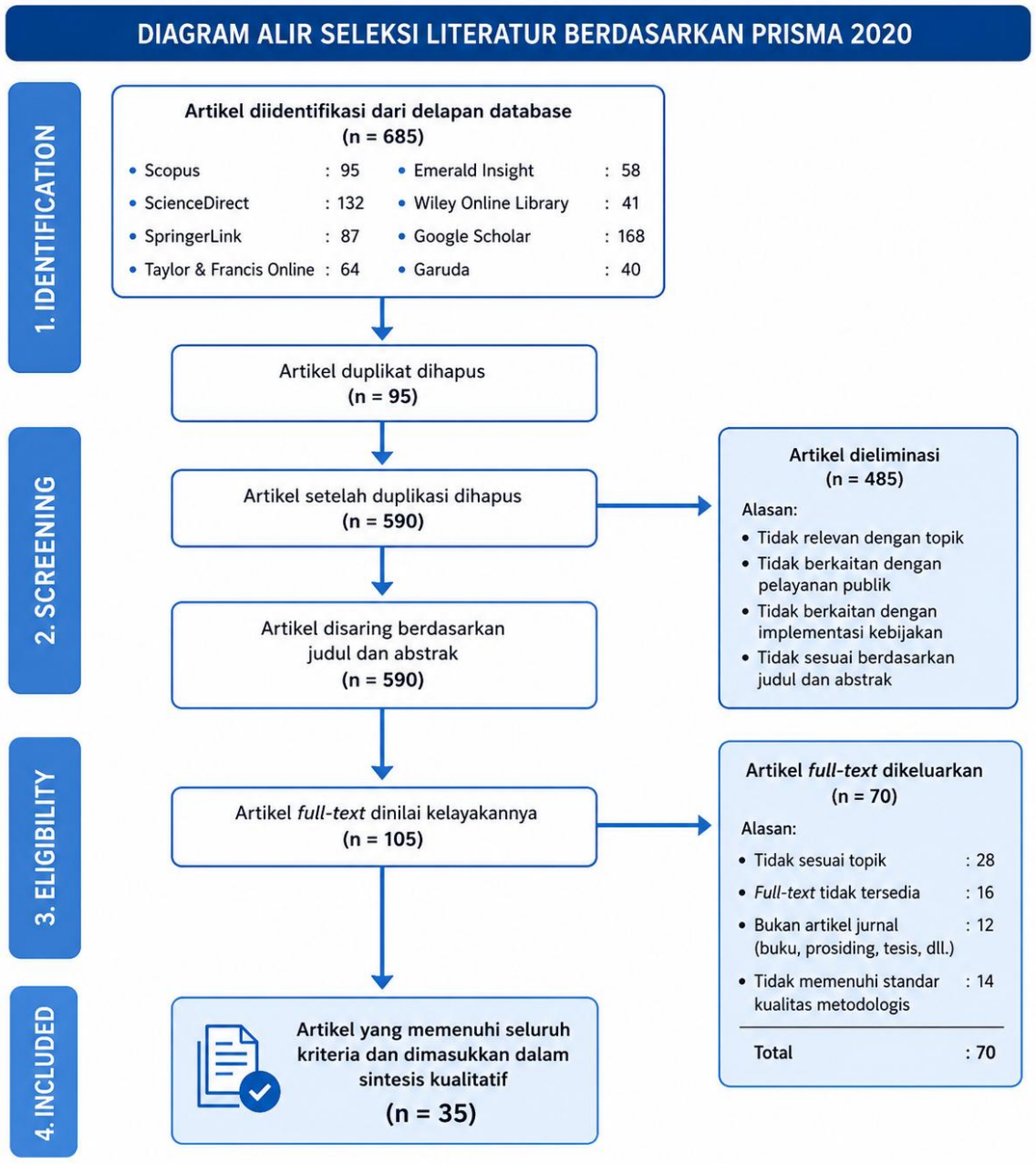
Pada tahap *screening*, sebanyak 485 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, 105 artikel full-text dinilai kelayakannya (*eligibility*). Sebanyak 70 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi atau tidak memenuhi standar kualitas metodologis. Dengan demikian, 35 artikel memenuhi seluruh persyaratan dan digunakan sebagai sumber data dalam proses sintesis.

Alur lengkap proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penetapan artikel yang dianalisis disajikan pada Gambar 1.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026



Gambar 1. Diagram Alir Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA 2020

Proses Ekstraksi Data

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

Data dari setiap artikel diekstraksi secara sistematis menggunakan lembar ekstraksi data (*data extraction form*) yang telah disusun sebelum proses sintesis. Informasi yang dikumpulkan meliputi nama penulis, tahun publikasi, negara atau lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, objek penelitian, bentuk implementasi desa digital, faktor pendukung implementasi, faktor penghambat implementasi, temuan utama, dan rekomendasi penelitian. Proses ekstraksi dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk meminimalkan potensi bias. Apabila terdapat perbedaan hasil ekstraksi atau interpretasi, dilakukan diskusi hingga diperoleh kesepakatan bersama.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis meliputi proses *coding*, pengelompokan kategori, identifikasi tema-tema utama, interpretasi hasil, dan sintesis temuan. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bentuk implementasi kebijakan desa digital dalam pelayanan publik, (2) faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan implementasi, serta (3) implikasi implementasi desa digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil sintesis disajikan dalam bentuk narasi, tabel karakteristik artikel, dan diagram alir PRISMA 2020 untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian pada bidang implementasi kebijakan desa digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Publikasi dan Tren Penelitian Desa Digital (RQ1)

Berdasarkan proses seleksi literatur menggunakan pedoman PRISMA 2020 diperoleh sebanyak 35 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kualitas metodologis untuk dianalisis. Artikel-artikel tersebut dipublikasikan pada periode 2021–2026 dan berasal dari berbagai jurnal nasional maupun internasional yang membahas implementasi kebijakan desa digital, digital government, smart village, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengenai desa digital mengalami peningkatan selama periode tersebut, terutama setelah tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada pemerintahan desa menjadi salah satu topik yang semakin mendapat perhatian dalam penelitian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan.

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus, terutama pada implementasi desa digital di Indonesia, sedangkan beberapa penelitian menggunakan metode survei, pendekatan kualitatif, mixed methods, maupun systematic literature review. Fokus kajian tidak hanya membahas penerapan teknologi informasi pada pelayanan administrasi desa, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap transparansi pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3.2 Bentuk dan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Digital di Desa (RQ1)

Sintesis terhadap 35 artikel menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa digital berkembang dalam beberapa bentuk inovasi pelayanan publik. Bentuk implementasi yang paling banyak ditemukan adalah Sistem Informasi Desa (SID) yang digunakan sebagai

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

media pengelolaan data kependudukan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi. Selain itu, banyak desa telah mengembangkan website desa sebagai sarana penyampaian informasi publik, publikasi kegiatan pemerintahan, transparansi penggunaan anggaran, serta media komunikasi dengan masyarakat.

Beberapa penelitian juga melaporkan implementasi pelayanan administrasi berbasis daring, seperti pelayanan surat-menyurat secara elektronik, digitalisasi administrasi kependudukan, serta pengelolaan arsip digital. Inovasi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi biaya operasional pemerintahan desa. Pada beberapa wilayah, implementasi Open Data Desa mulai diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, konsep Smart Village berkembang sebagai bentuk implementasi yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan teknologi digital dengan pembangunan ekonomi desa, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat.

Meskipun bentuk implementasi yang diterapkan relatif beragam, seluruh penelitian menunjukkan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien dibandingkan sistem pelayanan konvensional.

3.3 Sintesis Tematik Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Desa Digital (RQ2)

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan desa digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor yang paling dominan sebagai pendukung implementasi adalah ketersediaan infrastruktur digital, terutama jaringan internet yang stabil, perangkat teknologi informasi yang memadai, dan sistem informasi yang terintegrasi. Infrastruktur yang baik memungkinkan pemerintah desa memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan.

Selain infrastruktur, kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki kemampuan teknologi informasi mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan responsif. Dukungan kebijakan pemerintah, kepemimpinan yang inovatif, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan implementasi desa digital.

Di sisi lain, hampir seluruh penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang masih sering ditemui dalam implementasi desa digital. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan anggaran pengembangan teknologi informasi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antarinstansi. Berbagai kendala tersebut menyebabkan implementasi desa digital belum memberikan manfaat yang merata pada seluruh wilayah, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan infrastruktur digital yang masih terbatas.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

3.4 Analisis Kritis terhadap Hasil Penelitian

Analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan implementasi kebijakan desa digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Criado et al. (2021), Matheus et al. (2021), dan Dewi et al. (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik memberikan nilai tambah terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, hasil sintesis juga menemukan adanya perbedaan temuan (*divergent findings*) antarpenelitian. Das (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila belum didukung oleh infrastruktur digital yang memadai dan kapasitas aparatur desa yang kompeten. Temuan tersebut diperkuat oleh Yigitcanlar et al. (2022) yang menegaskan bahwa kesiapan teknologi dan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama keberhasilan transformasi digital pada sektor publik. Dengan demikian, keberhasilan implementasi desa digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, dukungan kebijakan, kepemimpinan, serta tingkat literasi digital masyarakat.

Perbedaan hasil antarpenelitian menunjukkan bahwa implementasi desa digital bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan desa digital tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam pada seluruh daerah, melainkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing desa.

3.5 Implikasi Penelitian

Berdasarkan sintesis terhadap 35 artikel, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila didukung oleh infrastruktur digital yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini memperkuat konsep *digital governance* yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan desa digital sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyediaan teknologi, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 35 artikel yang diseleksi menggunakan pedoman PRISMA 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa digital berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Berbagai bentuk inovasi yang ditemukan dalam literatur, seperti Sistem Informasi Desa (SID), website desa, pelayanan administrasi berbasis digital, *open data*, dan pengembangan konsep *smart village*, terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan desa digital tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

teknologi informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kompetensi aparatur desa, dukungan kebijakan pemerintah, kepemimpinan yang adaptif, ketersediaan anggaran, serta tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital di tingkat desa memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk terus memperkuat kebijakan pengembangan desa digital melalui pemerataan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyempurnaan regulasi yang mendukung integrasi sistem pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem desa digital yang berkelanjutan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di era transformasi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Kajian hanya mencakup artikel yang diterbitkan pada periode 2021–2026, menggunakan delapan basis data ilmiah, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Emerald Insight, Wiley Online Library, Google Scholar, dan Garuda, serta hanya memasukkan artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang tersedia dalam bentuk *full-text*. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan bahwa beberapa publikasi yang relevan pada basis data lain atau dalam bahasa lain belum terakomodasi dalam sintesis ini. Selain itu, sebagai penelitian berbasis Systematic Literature Review, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas metodologi dan kelengkapan pelaporan dari artikel-artikel yang dianalisis.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan literatur dengan melibatkan lebih banyak basis data internasional dan publikasi dalam berbagai bahasa agar diperoleh sintesis yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji implementasi kebijakan desa digital berdasarkan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan tingkat kesiapan digital setiap desa, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat mengenai pengaruh implementasi kebijakan desa digital terhadap kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan desa, dan keberlanjutan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Criado, J. I., Guevara-Gómez, A., & Villodre, J. (2021). Digital government, digital governance and public value creation. *Government Information Quarterly, 38*(4), 101629. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101629

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 25/07/2026; Revised: 30/07/2026;
Accepted: 30/07/2026; Published: 10/11/2026

Das, D. K. (2024). Exploring the symbiotic relationship between digital transformation, infrastructure, service delivery, and governance for smart sustainable cities. *Smart Cities, 7*(2), 806–835. https://doi.org/10.3390/smartcities7020034

Dewi, D. S. K., Harsono, J., Desriyanti, D., Yulianti, D. B., & Azhar, I. Y. (2022). The development of website-based Ngebel tourism from an e-government perspective. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12*(1), 30–40. https://doi.org/10.26618/ojip.v12i1.6127

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., Dennehy, D., Metri, B., Buhalis, D., Cheung, C. M. K., Conboy, K., Doyle, R., Dubey, R., Dutot, V., Felix, R., Goyal, D. P., Gustafsson, A., Hinsch, C., Jebabli, I., & Wamba, S. F. (2023). *So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy*. International Journal of Information Management, 71, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Henman, P., Graham, T., & Lata, L. N. (2021). Building the "front door" within a web ecology: Informational governance and institutional shaping of national government web portals. *Government Information Quarterly, 38*(1), 101575. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101575

Hussain, S., & Suryaningrum, D. H. (2026). Digital transformation in public policy: A systematic literature review of e-government implementation and its impact on public services. *Public Management and Administrative Review, 7*(1), 1–18.

Kassen, M. (2022). A promising phenomenon of open data: A case study of the Chicago Open Data Project. *Government Information Quarterly, 39*(4), 101728.

Matheus, R., Janssen, M., & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government. *Government Information Quarterly, 38*(1), 101550. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Jaramillo, P. A. (2023). Digital government transformation and public value: A systematic review. *Government Information Quarterly, 40*(3), 101822.

Yigitcanlar, T., Desouza, K. C., Butler, L., & Roozkhosh, F. (2022). Contributions and risks of artificial intelligence in public governance: A systematic review. *Government Information Quarterly, 39*(4), 101681. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101681

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.